

## Minsen: Selamatkan Aset Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN - Ketua DPRD Kalbar, Minsen meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI terkait raibnya aset milik Pemprov Kalbar senilai Rp 1,95 miliar.

Minsen mengatakan, aset Kalbar tersebut harus diselamatkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi garda terdepan dalam hal penyelamatan aset Kalbar. Sesuai dengan arahan Gubernur, sudah seharusnya seperti itu. Jaringan SKPD ini harus melaksan-



TRIBUN/DOK  
Minsen

akan segera sebelum 2012," ujar Minsen kepada *Tribun* di ruang kerjanya, Jumat (4/11).

Ditambahkannya, berkaitan dengan tanah dan bangunan yang lebih dari Rp 5 miliar, berdasarkan pasal 46 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 disebutkan tidak perlu ada persetujuan DPRD.

Dewan, jelasnya, akan membentuk Pansus Aset dan sudah diagendakan dalam Bamus. Untuk diketahui, sebanyak 21 anggota DPRD Kalbar mendesak Ketua DPRD untuk segera membentuk Pansus Aset.

■ Bersambung ke Hal. 15

## Minsen: Selamatkan Aset Kalbar

Sambungan Hal. 9

"Pansus aset, sudah diagendakan untuk pembentukannya dalam Banmus. Langkah pertama tetap dibicarakan dengan eksekutif. Aset ini mau dijual atau secara kredit. Ini harta pemprov. Secara pribadi saya tidak ingin dihapuskan," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota BPK Rizal Djilil dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kalbar, Kamis (3/11) mengungkapkan, ada 26 temuan pemeriksaan yang ditinjau dari aspek perolehan, aspek penggunaan dan pemanfaatan, aspek pengamanan dan pemeliharaan, maupun aspek penghapu-

san dan pemindahtanganan.

Selain persoalan perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga lemah dan belum menguntungkan Pemprov, BPK menemukan adanya barang milik Pemprov Kalbar minimal senilai Rp 1,95 miliar yang tidak diketahui keberadaannya.

Aset itu berupa peralatan dan mesin pada Dinas Sosial senilai Rp 1,5 miliar, dan Dinas Pendidikan minimal senilai Rp 409 juta. Aset-aset yang diperoleh dari hibah atau bantuan pemerintah pusat tidak jelas statusnya senilai Rp 3,84 miliar lebih.

Tidak itu saja, ada juga penggunaan dan pemanfaatan aset peralatan dan mesin milik Pemprov Kalbar yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 2,89 miliar lebih.

Selain itu, tanah milik Pemprov Kalbar yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp 917 juta lebih. Tanah ini terdiri atas enam bidang tanah seluas 155.124 m<sup>2</sup> tersebar di Pontianak, Singkawang, dan Bengkayang, telah dikuasai pihak ketiga.

Selain itu, pengamanan tanah milik Pemprov Kalbar yang belum optimal atau belum besertifikat senilai Rp 79,9 miliar. (thd)